

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020 – 2022

Ambarwati¹, Atissa Nurbaeti²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : ambaryusuf26@gmail.com^{1*} ; chryszant@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Motor Vehicle
Tax Revenue, Regional
Original Income

During the period of 2020–2022, there was a significant fluctuation in the revenue from vehicle tax in DKI Jakarta, especially related to the decrease in the effectiveness ratio of PKB revenue, which was inversely proportional to the increase in the number of motor vehicles in DKI Jakarta. The purpose of this study is to analyze and evaluate the effectiveness of PKB in increasing the Regional Original Revenue of DKI Jakarta Province in 2020–2022, identify inhibiting factors, and analyze and evaluate efforts made to overcome obstacles in achieving PKB in increasing the PAD of DKI Jakarta Province in 2020–2022. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis through interviews. The method of collecting field research data is through interviews and literature studies. Interviews were conducted in a structured manner with six informants. The effectiveness of PKB revenue in DKI Jakarta Province in increasing the regional original revenue in 2020–2022 has not been effective based on three main approaches, according to Duncan's theory, especially in the goal achievement and integration approaches that have not been effective. On the other hand, the adaptation approach to PKB has been effective in adjusting policies to the dynamics of the economic and social environment. Inhibiting factors in PKB revenue contributing to increasing the Regional Original Revenue of DKI Jakarta Province in 2020–2022 include physical activity restrictions due to the COVID-19 pandemic resulting in decreased community purchasing power and difficulty in identifying motor vehicle objects outside the DKI Jakarta area, progressive tax imposition rules causing dissatisfaction among taxpayers with more than one vehicle, lack of tax compliance socialization, technical constraints in applications, data mismatch, low tax awareness, and tax avoidance practices.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang memerlukan alokasi dana yang memadai. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan guna mengelola urusan lokal dengan maksud mengoptimalkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber daya keuangan lokal guna membiayai proyek-proyek pembangunan yang diperlukan. Pentingnya otonomi pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi lokal tercermin dalam peran sentral pajak daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan mandiri.

Namun, ketersediaan dana yang memadai juga krusial dalam mendukung pembangunan yang lebih baik. Melalui alokasi dana yang tepat dan efisien, pemerintah dapat mewujudkan proyek-proyek pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan sinergi antara sumber daya manusia yang berkualitas dan pengelolaan dana yang bijak, negara memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan signifikan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pajak menjadi instrumen vital dalam pembangunan dan kelangsungan operasional negara, sebagaimana disebutkan oleh (Jumaiyah & Wahidullah, 2020) “pajak merupakan hal yang harus diberikan rakyat kepada negara untuk kepentingan negara dalam menunaikan kewajibannya menyelenggarakan pemerintahan”

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sentral yang vital dalam pertumbuhan dan perkembangan negara. Jakarta, sebagai ibu kota, menampilkan dinamika ekonomi yang signifikan dan memberikan beragam potensi pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar keuangan daerah, memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Konsep PAD, sebagaimana didefinisikan oleh (Nasir, 2019, p. 33) menyoroti peran utamanya sebagai sumber pendapatan daerah yang esensial untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah guna memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar pendapatan PAD yang diperoleh oleh suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat pembangunan yang dapat dicapai di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs web resmi <https://metro.tempo.co> pada 31 Juli 2023 pukul 21.41 WIB, Kementerian Dalam Negeri mencatat lima provinsi dengan tingkat pendapatan terendah pada akhir tahun 2022, termasuk Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaporkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, pendapatan Jakarta baru mencapai 75,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2022. Penurunan penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta menjadi sebuah fenomena yang signifikan dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Salah satu aspek yang memengaruhi PAD adalah pajak daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2019, p. 12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pola dalam perubahan penerimaan Pajak Daerah selama tahun-tahun tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan regulasi spesifik dalam PERGUB Nomor 53 Tahun 2020 di Jakarta, yang mengatur penghitungan dasar PKB untuk berbagai jenis kendaraan. Peraturan tersebut memiliki peranan signifikan dalam mengelola serta menyesuaikan aspek perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan di tingkat daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Kumalasari, 2022, p. 14), PKB menjadi salah satu komponen PAD yang termasuk dalam kategori pajak provinsi sesuai penjelasan tentang jenis pajak daerah. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta tahun 2020-2022:

Tabel 1

Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2020-2022 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Target	Penerimaan PKB	Efektivitas
2020	8,000	7,879	98.49%
2021	8,800	8.532	96.95%
2022	9,000	9.404	104,49%

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan tabel 1 data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta selama periode 2020-2022, terlihat bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi yang signifikan dalam pendapatan PKB selama periode tersebut, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti salah satunya perubahan dalam jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar.

Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2020	24,266,996 unit
2021	25,263,077 unit
2022	26,370,535 unit

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan tabel 2 yang menampilkan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta selama periode 2020-2022, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dalam jumlah kendaraan bermotor selama tiga tahun tersebut. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor ini menjadi salah satu faktor yang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Efektivitas penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2022 mencerminkan dinamika menarik. Meskipun terjadi fluktuasi, data menunjukkan pendapatan dari PKB cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas penerimaan PKB adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah tersebut, yang mengalami peningkatan konsisten dalam tiga tahun berturut-turut. Pertumbuhan ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan PKB dan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor secara konsisten menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan PKB dan mendukung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting dalam merancang kebijakan pajak yang efektif. Dengan strategi perpajakan yang tepat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan pertumbuhan kendaraan sebagai sumber pendapatan yang lebih besar, yang akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022, pendekatan pencapaian tujuan dinilai kurang efektif karena bersifat statis dan tidak memperhitungkan dinamika lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan. Sementara itu, pendekatan integritas juga terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan meskipun platform pembayaran telah lebih mudah diakses. Penelitian oleh (Rialdy,

2022) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB pada tahun 2020 masih di bawah target yang ditetapkan, mengindikasikan kurang optimalnya kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (SAMSAT) akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada efektivitas pendapatan dari PKB, pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah, perubahan tahunan dalam penerimaan, serta faktor eksternal yang memengaruhinya.

Dengan gambaran fenomena terkait pajak kendaraan bermotor yang telah disajikan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja pajak tersebut dan untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian pajak tersebut beserta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut (Mahmudi, 2019, p. 86) “efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan” Sementara menurut teori Duncan “terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.” (Ismaya, Mustafa, & Jopang, 2022, p. 42). Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, dimana semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Wulandari & Iryanie, 2018, p. 23) sebagai berikut “pendapatan asli daerah merupakan salah satu kompinen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah” Menurut (Nasir, 2019, p. 33) mendefinisikan “Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut” Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli, termasuk dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. PAD berperan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, semakin besar pendapatan PAD yang diperoleh oleh suatu daerah, semakin sebanding pula dengan laju pembangunan yang dapat direalisasikan di dalamnya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berlandaskan pada Pasal 6 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Kendaraan Bermotor tergolong sebagai jenis pajak progresif, di mana tarif pajaknya meningkat seiring dengan peningkatan nilai objek pajak, sesuai dengan persentase yang ditetapkan." Menurut (Kumalasari, 2022, p. 14) dijelaskan bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor menjadi komponen yang ada dalam pendapatan Pendapatan Asli Daerah atau lebih dikenal sebagai Pajak Daerah, yang termasuk dalam kategori pajak provinsi seperti yang diuraikan dalam penjelasan tentang jenis pajak daerah". Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam jenis pajak progresif, di mana tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan nilai objek pajak sesuai persentase yang ditetapkan. Pajak ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan komponen Pajak Daerah, dan termasuk dalam kategori pajak provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2022 menunjukkan penerapan pendekatan studi yang bertujuan menjaga fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022

Metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi adalah melalui pengukuran efektivitas organisasi. Dalam konteks penilaian tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PKB dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan ini dilakukan dengan mengaplikasikan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas\ PKB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB}{Target\ PKB} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui efektivitas PKB pada tahun 2020-2022 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Efektivitas Penerimaan PKB Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2020	8,000,000,000	7,879,000,000	98.49%	Efektif
2021	8,800,000,000	7,980,000,000	96.95%	Efektif
2022	9,000,000,000	8,620,000,000	104,49%	Sangat Efektif
	Rata-rata		99,97%	Efektif

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2022, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak ini secara keseluruhan dapat dianggap sangat efektif. Pada tahun 2020, efektivitas mencapai 98.49%, diikuti oleh tahun 2021 dengan 96.95%, dan tahun 2022 sebesar 104,49%. Meskipun terjadi penurunan efektivitas pada tahun 2021, rata-rata efektivitas selama tiga tahun mencapai 99.97%, yang masih tergolong sebagai kategori efektif.

Efektivitas PKB dalam meningkatkan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 mencerminkan konsep efektivitas yang selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Menurut teori Duncan "terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi." (Ismaya, Mustafa, & Jopang, 2022, p. 42)

Dalam mengevaluasi efektivitas penerimaan PKB di DKI Jakarta, hasil wawancara dengan para informan menjadi faktor kunci dalam penilaian tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1) Pendekatan pencapaian tujuan

Menurut teori Duncan, "pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukan suatu proses atau tahapan." (Siagian, 2021) Pendekatan pencapaian tujuan melibatkan penentuan target yang ditetapkan dan evaluasi hasil akhir pencapaian. Penetapan target penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2022 telah berjalan dengan efektif dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk proyeksi pertumbuhan kendaraan, evaluasi kinerja sebelumnya, analisis ekonomi dan sosial, serta pertimbangan kebijakan pajak. Proses ini mengandalkan penggunaan data historis dan proyeksi masa depan untuk menetapkan target yang realistis dan dapat dicapai. Meskipun proses tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang diperlukan, masih ada yang menganggap bahwa evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keefektifan dan keakuratan penetapan target.

Oleh karena itu, penetapan target penerimaan PKB di DKI Jakarta tahun 2020-2022 telah memperhitungkan berbagai faktor penting, namun perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan keefektifan penetapan target di masa mendatang. Proses menetapkan target PKB melibatkan langkah-langkah yang holistik dan adaptif, termasuk evaluasi kinerja, proyeksi pertumbuhan, analisis kepatuhan, dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan, yang menggambarkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan pendapatan yang optimal sesuai dengan kondisi terkini dan proyeksi masa depan.

Pada realisasi penerimaan PKB di DKI Jakarta tahun 2020-2022 belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini belum berjalan efektif. Meskipun terdapat fluktuasi dalam target penerimaan setiap tahunnya, realisasi penerimaan cenderung tidak selalu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB masih jauh dari harapan, terutama jika mempertimbangkan mobilitas kendaraan yang tinggi di kota tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara lebih konsisten di masa mendatang. Hasil akhir pencapaian penerimaan PKB DKI Jakarta selama tahun 2020-2022 menggambarkan situasi yang kompleks dan memerlukan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan di masa mendatang.

2) Pendekatan integritas

Dalam teori Duncan, "integrasi adalah evaluasi kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan membangun hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan." (Hidayat & Nursyadana, 2022) . Pendekatan integrasi merujuk pada evaluasi terhadap kemampuan sebuah organisasi untuk melakukan sosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Adapun efektivitas PKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 dalam pendekatan integrasi belum berjalan dengan efektif, khususnya dalam kemampuan sosialisasi, menunjukkan variasi persepsi dari berbagai informan. Meskipun program atau kebijakan terkait PKB telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi seperti pemberitahuan resmi, kampanye informasi, website, media sosial, dan acara publik, tantangan dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi masih ada.

Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang

belum menyadari kewajiban pembayaran pajak kendaraan, meskipun platform pembayaran sudah lebih mudah untuk diakses. Menghadapi tantangan ini, diperlukan pemanfaatan layanan iklan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dan potensi penerimaan pajak kendaraan. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi, ketepatan informasi, dan aksesibilitas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor serta memperkuat integritas program PKB secara keseluruhan.

3) Pendekatan adaptasi

Menurut teori Duncan, “adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya” (Hidayat & Nursyadana, 2022). Pendekatan adaptasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatur diri agar cocok dengan perubahan yang terjadi di sekitar. Pendekatan adaptasi dalam konteks efektivitas melibatkan kemampuan sebuah instansi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini mencakup upaya untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah demi kelangsungan aktivitas atau tujuan tertentu. Efektivitas PKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020-2022 dalam pendekatan adaptasi telah berjalan dengan baik dan efektif dalam menyesuaikan kebijakan pajak kendaraan bermotor dengan dinamika lingkungan ekonomi dan sosial. Melalui evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan yang relevan, pemerintah dapat merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi dan sosial secara efektif.

Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pajak kendaraan bermotor tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang muncul dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara optimal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan evaluasi dan perbaikan yang signifikan, terutama terkait integrasi sistem untuk memastikan kemudahan bagi wajib pajak, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak saat kondisi ekonomi menurun. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dengan era ekonomi digital, perlu dilakukan perhatian lebih lanjut terhadap sistem perpajakan secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Salah satu aspek yang harus mendapat perhatian khusus adalah upaya untuk menyamakan kemampuan pemerintah dalam mencakup wilayah Jakarta secara menyeluruh, hal ini menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan agar pemerintah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan sekitarnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan sistem perpajakan secara keseluruhan.

2. Faktor penghambat dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022

Beberapa faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkontribusi pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 antara lain:

- 1) Pandemi COVID-19 secara signifikan membatasi aktivitas fisik, termasuk penagihan pajak dan penggalan potensi, menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan kesulitan dalam mengidentifikasi objek kendaraan bermotor di luar wilayah DKI Jakarta.
- 2) Aturan pengenaan pajak progresif menimbulkan ketidakpuasan pada wajib pajak dengan lebih dari satu kendaraan, yang dapat menghambat proses pemungutan PKB.

- 3) Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta rendahnya kesadaran pajak masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pemungutan PKB.
- 4) Ketidaksiesuaian data, rendahnya kesadaran pajak, dan praktik penghindaran pajak juga menjadi hambatan dalam proses pemungutan PKB.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022

Upaya dalam meningkatkan penerimaan PKB dalam meningkatkan PAD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 melibatkan serangkaian langkah strategis. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut:

- 1) Pengintegrasian Perizinan dengan Kewajiban Pajak Daerah: melalui program tax clearance, perizinan dan kewajiban pajak daerah diintegrasikan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi bagian dari proses perizinan.
- 2) Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data objek pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor diperbaharui secara berkala dan akurat.
- 3) Kolaborasi dengan KPKRI dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 4) Dengan penempelan atributif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sistem one map diharapkan dapat memberikan informasi yang terintegrasi dan komprehensif mengenai pajak kendaraan bermotor.
- 5) Pengurangan tarif progresif untuk mengurangi beban pajak yang dirasakan oleh pemilik kendaraan bermotor dengan memiliki lebih dari satu unit.
- 6) Sosialisasi tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor disampaikan kepada masyarakat secara luas melalui iklan layanan masyarakat.
- 7) Kolaborasi dengan pihak swasta dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien.
- 8) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020-2022 belum berjalan dengan efektif berdasarkan tiga pendekatan utama menurut teori Duncan, yakni pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Pada pendekatan pencapaian tujuan dalam penetapan target penerimaan PKB telah mempertimbangkan berbagai faktor namun realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berjalan secara efektif. Begitu pula dengan pendekatan integrasi yang belum berjalan efektif meskipun telah melalui berbagai saluran komunikasi untuk mensosialisasikan PKB. Sementara di sisi lain, pendekatan adaptasi terhadap PKB telah berjalan efektif dalam menyesuaikan kebijakan pajak kendaraan bermotor dengan dinamika lingkungan ekonomi dan sosial melalui evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan yang relevan.
2. Faktor penghambat dalam penerimaan PKB yang berkontribusi pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 meliputi pembatasan aktivitas fisik akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan daya jual masyarakat dan kesulitan mengidentifikasi objek kendaraan bermotor di luar wilayah DKI Jakarta, aturan pengenaan pajak progresif yang menimbulkan ketidakpuasan pada wajib pajak dengan lebih dari satu kendaraan, kurangnya sosialisasi tentang kepatuhan pajak, kendala teknis dalam aplikasi, ketidaksesuaian data, rendahnya kesadaran pajak, dan praktik penghindaran pajak.
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta melibatkan langkah strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pengintegrasian perijinan dengan kewajiban pajak daerah melalui program tax clearance, pemutakhiran data objek pajak berbasis NIK, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui law enforcement bersama KPKRI, pengembangan sistem one map melalui kebijakan JakartaSatu dengan penempelan atributif dari masing-masing SKPD, pengurangan tarif progresif, sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat, optimalisasi aplikasi yang terintegrasi, kerja sama dengan pihak swasta, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Nursyadana, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTB Samsat Mamuju. *Indonesian Annual Conference Series, 1*(2022: Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)), 82-87. Retrieved from <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/555>
- Ismaya, N., Mustafa, L. O., & Jopang. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus, dan Praktik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kumalasari, D. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Pada Saat Pandemi Covid 19. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2*(1), 30-45. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences, 1*(3), 413–423. doi:<https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.99>
- Siagian, H. S. (2021). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. *IPDN, 1*-15.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Digital.